

Pendampingan Nelayan Bagan di Kecamatan Sumur-Kabupaten Pandeglang Dalam Implementasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

(Assistance for Lift Net Fishermen in Sumur District, Pandeglang Regency, in Implementing Compatibility of Marine Spatial Utilization Activities)

Akhmad Solihin*, Darmawan, Muhammad Fedi Alfiadi Sondita, Yopi Novita, Vita Rumanti, Prihatin Ika Wahyuningrum, Tri Nanda Citra Bangun

¹ Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, Penulis Korespondensi: akhmad_solihin@apps.ipb.ac.id

ABSTRAK

Setiap orang yang memanfaatkan ruang laut wajib memiliki perizinan berusaha, termasuk alat tangkap bagan yang bersifat mebnetaap. Oleh sebab itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman nelayan bagan mengenai perizinan PKKPRIL untuk alat tangkap menetap, melakukan pendampingan awal terkait persiapan pengurusan perizinan PKKPRIL, dan mendorong peran aktif Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi perizinan PKKPRIL. Metode yang digunakan yuridis normatif dan analisis deskriptif. Hasil yang diperoleh bahwa nelayan bagan di Sumur tidak mengetahui adanya kewajiban PKKPRIL bagan, sehingga berpotensi sebagai pelaku IUU fishing. Dalam hal pendampingan diperoleh informasi PKKPRIL bagan perlu dilakukan dengan menetapkan koordinat area penangkapan ikan bagan di atas 4 mil laut, karena nelayan bagan di Sumur bergerak berdasarkan musim penangkapan ikan. Pemerintah Kabupaten Pandeglang diharapkan aktif melakukan pendampingan perizinan PKKPRIL bagan. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan pendampingan lanjutan yang ditujukan kepada pemerintah daerah dan masyarakat nelayan bagan.

Kata kunci: nelayan bagan, PKKPRIL, Pemerintah Daerah

ABSTRACT

Everyone utilizing marine space must obtain a business permit, including fixed lift-net fishing gear. Therefore, this activity aims to enhance lift net fishermen's understanding of the Marine Space Utilization Suitability Permit (PKKPRIL) for fixed fishing gear, provide initial assistance in preparing for PKKPRIL licensing, and encourage the active role of local governments in facilitating PKKPRIL licensing. The methods used include normative juridical approaches and descriptive analysis. The results revealed that lift net fishermen in Sumur District are unaware of the obligation to obtain PKKPRIL for their lift nets, potentially categorizing them as IUU (Illegal, Unreported, and Unregulated) fishing practitioners. During the assistance process, it was found that PKKPRIL for lift nets should include the designation of fishing area coordinates beyond 4 nautical miles, as the lift net fishermen in Sumur operate based on the seasonal migration of fish. The Pandeglang Regency Government is expected to assist in the licensing process for PKKPRIL lift nets actively. Based on these findings, further assistance is necessary, targeting both local governments and lift-net fishing communities to ensure compliance with PKKPRIL requirements.

Keywords: lift-net fishermen, PKKPRIL, local government.